

Daftar Isi

Image and the Veil: A Barthesian Reading of Veiled Muslim Women Diah Ariani Arimbi	189–194
Peran Politik Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau, Sumatera Barat Nurwani Idris	195–205
Peranan Perempuan dan Pembangunan di Indonesia Benny Ferdy Malonda	206–218
Makna Seksualitas bagi Akseptor Tubektomi Subagyo Adam	219–224
"Mappasikarawa" dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo Paisal.....	225–231
Mencari Partai Politik Ber-Platform Pembangunan Pedesaan Dwiyanto Indiahono	232–235
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Lamongan Roestoto Hartojo Putro	236–242
Anteseden Rasa Saling Percaya dan Kerja Sama Cerdas dalam Tataan Budaya Kolektivistik untuk Membangun Modal Sosial dan Modal Intelektual Siti Sulasmi	243–250
Pemasaran pada Pemerintah Lokal Mas Roro Lilik Ekowanti	251–258
Bencana Tsunami dan Stres Pasca-Trauma pada Anak Nurul Hartini	259–264
Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa FISIP dan Fakultas Farmasi Unair dalam Proses Penulisan Skripsi Agus Santoso.....	265–273

Mencari Partai Politik Ber-Platform Pembangunan Pedesaan

Dwiyanto Indiahono¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRACT

Social equity for all Indonesians obliges the distribution of prosperity between urban and rural side. Caring many institutions from government agency and non-governmental agency to rural development practically have not yet maximally supported political process of rural people. One of the factors causing this has been a weak support from political parties. This article suggests that stimulating political party to voice rural development is in an urgent need as political parties are the most responsible institution to voice rural aspirations and also suggest that political parties have to start empowering rural society in creating powered and self-supporting rural society. In choosing political parties, public should consider parties which are committing with rural development and mutual profiting development between urban and rural.

Key words: *commitment, political party, rural development, and rural policy*

Pembangunan pedesaan sudah lama didengungkan oleh banyak pihak dari kalangan praktisi, pemerintah, akademisi, peneliti dan lembaga swadaya masyarakat. Pembangunan pedesaan diakui amat strategis dalam menggerakkan perekonomian kerakyatan dan pembagian kesejahteraan (*distribution of welfare*). Perdebatan tentang pertumbuhan, kemiskinan dan keadilan sosial memang telah menjadi perdebatan dan diskusi yang menarik (Kanbur, 2005; Chatterjee, 2005 dan Smeeding, 2005). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjuk terdistribusikannya kesejahteraan dari kota hingga ke pelosok desa. Kepedulian banyak pihak dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah terhadap pembangunan pedesaan pada kenyataannya belum secara maksimal memberikan keberpihakan proses politik terhadap orang desa sendiri. Salah satu faktor yang dapat ditunjuk adalah lemahnya daya dukung partai politik terhadap pembangunan pedesaan. Hal ini menjadi krusial sebab dukungan sistem politik terhadap segala kebijakan yang terkait dengan desa amat menentukan kelahiran kebijakan yang benar-benar pro terhadap rakyat desa. Tulisan ini hendak menjelaskan urgensi partai politik untuk peduli kepada pembangunan pedesaan, kegagalan sistem politik saat ini dan gagasan sistem politik masa depan untuk pembangunan pedesaan.

Partai Politik dan Kebijakan Pedesaan

Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia dengan amat terbuka menunjukkan bahwa publik telah menentukan wakil-wakilnya untuk menyuarakan aspirasinya di dewan perwakilan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam dewan perwakilan rakyat dalam sistem politik yang berlaku sekarang kebanyakan dari partai politik. Sehingga partai politik secara pasti ditunjuk sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.

Selain hal tersebut, dalam konteks kebijakan publik, publik merupakan pihak yang paling berhak untuk menentukan arah, tujuan dan proses dari sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka sendiri. Sehingga, jika dalam sistem politik Indonesia mempercayai sistem perwakilan sebagai sistem yang paling dipercaya dapat menyuarakan aspirasi publik. Maka, dewan perwakilan rakyat (DPR/D) diharuskan mendengarkan saran, kritik, masukan dan aspirasi dari publik yang mereka wakili. Sistem demokrasi yang berlaku demikian menyebabkan partai politik menjadi institusi yang paling bertanggung jawab atas kelahiran setiap kebijakan di negeri ini, termasuk kebijakan pembangunan pedesaan.

¹ Korespondensi: D. Indiahono. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Alamat: Jl. Prof. DR. H. Bunyamin 993 Purwokerto – Indonesia 53122. E-mail: indiahono@yahoo.com.

Kebijakan publik dengan demikian menjadi ranah yang tidak bebas nilai karena terkait dengan banyak aspirasi dan kepentingan. Kebijakan publik dapat diterjemahkan menjadi proses tarik ulur kepentingan: desa versus kota, pasar modern versus pasar tradisional, pemilik modal versus buruh dan lain sebagainya. Sehingga, jika publik mengharapkan kebijakan pembangunan pedesaan yang benar-benar berpihak kepada desa maka ada dua hal yang patut diperhatikan:

Pertama, adalah sistem kebijakan yang berpihak kepada desa. Sistem kebijakan yang berpihak kepada desa adalah sistem yang memiliki komitmen untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan desa dan berpihak kepada kepentingan orang desa. Anderson (1979) menyatakan bahwa dalam kebijakan publik, para pembuat kebijakan amat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkunganlah yang telah memengaruhi kondisi psikis dan logika pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Lingkungan kebijakan harus dapat memengaruhi sistem pengambilan kebijakan. Untuk itulah kelahiran sistem kebijakan yang berpihak kepada desa menunjuk adanya *pressure* kepada sistem kebijakan publik dalam hal ini DPR untuk lebih berpihak kepada desa dan orang desa. Kelahiran sistem kebijakan yang berpihak kepada desa ini dalam ranah teknis mengalami kendala karena berada dalam aktivitas politik praktis yang rentan dengan konflik. Hal ini disebabkan, *pressure* kepada DPR untuk berpihak kepada pembangunan desa dapat menstimulan resistensi dari kelompok kepentingan lain yang tidak sependapat dengan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan desa.

Kedua, adalah menstimulan lahirnya partai politik yang berkomitmen kepada pembangunan pedesaan. Lahirnya partai politik yang berkomitmen kepada pembangunan pedesaan menunjuk: menekan partai politik untuk memiliki platform yang jelas terhadap pembangunan pedesaan dan memilih partai-partai politik yang memiliki *platform* pembangunan pedesaan. Kelahiran partai politik yang memiliki komitmen kepada pembangunan pedesaan setidaknya menjadi garansi tersampainya aspirasi orang desa dalam parlemen dan memberikan garansi kesempatan yang lebih besar untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang lebih terpadu.

Partai politik yang memiliki *platform* pembangunan pedesaan setidaknya memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap kebijakan pedesaan yang lebih sesuai dengan aspirasi tingkat lokal. Partai politik yang ber-*platform* pembangunan pedesaan akan sangat sadar bahwa kondisi tiap

desa di Indonesia amat beragam dan tidak mungkin tergambarkan secara sempurna dan homogen. Sehingga, dari pemahaman ini pengambil kebijakan dalam hal ini partai politik akan sangat memperhatikan aspirasi tingkat lokal untuk menentukan kebijakan. Selain itu, hal ini dapat melahirkan pembangunan pedesaan yang terpadu karena dilihat dari level yang lebih atas atau lebih makro. Kebijakan yang dilahirkan sebisa mungkin tidak menimbulkan pembangunan pedesaan yang bersifat *trade off*. Pembangunan pedesaan yang bersifat *trade off* bermakna pembangunan desa satu menimbulkan kerugian pada pembangunan di desa lain. Kebijakan yang dilahirkan oleh partai politik dan sistem politik yang berpihak kepada pembangunan pedesaan seharusnya dapat melahirkan kebijakan yang *win win solution*, atau kebijakan pembangunan di desa satu juga memberikan manfaat atas pembangunan di desa yang lain.

Partai Politik Ber-Platform Pembangunan Pedesaan: antara Ancaman dan Keberpihakan

Jika dilihat dari sejarah pembangunan pedesaan di Indonesia, sampai saat ini belum ada partai politik yang secara terbuka memberikan jargon-jargon politik yang pro kepada pembangunan pedesaan. Meskipun demikian, kesempatan untuk melahirkan partai politik yang pro kepada pembangunan pedesaan tidaklah mustahil. Kemenangan Bibit Waluyo dan Rustriningsih dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur secara langsung di Jawa Tengah dengan mengangkat jargon politik: "*Bali Ndeso, Mbangun Deso*", setidaknya memberikan dua bukti penting. Bukti pertama menunjukkan bahwa menantikan aktor politik dengan *platform* pembangunan pedesaan bukanlah sekedar utopis. Adapun bukti kedua, adalah bahwa jargon pembangunan pedesaan merupakan jargon politik yang cukup menjanjikan saat kampanye. Jargon politik pembangunan pedesaan merupakan isu baru yang sangat strategis bagi para politisi, sebab sampai detik ini mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Namun, jargon politik yang *marketable* ini janganlah sekedar pemanis bibir saat kampanye saja. Lebih dari itu, partai politik atau politisi harus benar-benar serius dan berkomitmen memikirkan masalah pembangunan pedesaan yang kian terhimpit dengan modernisasi dan pasar bebas.

Partai politik yang membawa jargon pembangunan pedesaan menjadi sulit untuk ditemukan disebabkan

oleh beberapa hal, di antaranya: (1) partai politik Indonesia sampai saat ini belum mampu berdiri secara independen dalam melakukan aktivitas politiknya. Partai politik amat rentan untuk dibiayai dan disponsori oleh pihak ketiga dan hampir dipastikan itu bukan dari golongan masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduk miskin. Kebanyakan yang mensupport para politisi melalui sumbangan untuk aktivitas politik partai adalah orang-orang bisnis dari kota yang memiliki modal kuat. Jika demikian kejadiannya, dapat dipastikan bahwa partai politik tidak akan menyuarakan aspirasi masyarakat pedesaan; dan (2) sebagai imbas dari poin pertama adalah isu-isu yang terkait dengan pembangunan pedesaan bukanlah menu utama yang akan menjadi isu strategis partai politik. Menu pembangunan pedesaan amat sensitif bagi kekuatan pasar dan modal yang selama ini menjadi penyumbang partai politik. Setidaknya, isu pembangunan desa versus kota masih kental dan dikotomis. Bentuknya adalah *trade off*, jika tidak memihak kota maka harus memihak desa. Bukan *win-win solution*, misalnya: pembangunan kota untuk masyarakat desa, atau kota untuk desa, atau desa untuk kota, yang lebih mengedepankan saling ketergantungan dan saling menguntungkan.

Dalam ranah teoretik selama ini dikenal dua paradigma pembangunan kota. Paradigma yang pertama adalah *Urban Oriented Paradigm* (UOP). Paradigma ini memiliki filosofi pembangunan *city is just for urban residents* atau *city is just for the city itself*. Kerangka paradigma ini lahir karena masih tersedianya lahan kosong yang luas, baik di dalam maupun di luar kota. Daerah pinggiran kota yang dikembangkan sebagian besar didominasi oleh lahan kosong atau lahan yang tidak produktif, sehingga setiap usaha untuk membangun fungsi-fungsi kekotaan baru sebagai bentuk perkembangan dapat dilakukan setiap saat. Paradigma yang kedua adalah *Rurban Oriented Paradigm* (ROP). Paradigma ini melandasi filosofinya pada *the development of a city is not just for the city itself but also for the rural areas*. Paradigma ini lahir karena adanya kesadaran bahwa disekitar kota yang dikembangkan banyak terdapat lahan pertanian yang produktif, serta sektor pertanian yang masih memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. *Rurban oriented paradigm* menghendaki perkembangan kota tidak boleh hanya untuk kepentingan kota itu sendiri dan kehidupan kota tidak dapat dipisahkan dari kehidupan desa, sehingga program pengembangan kota juga harus memperhatikan kepentingan desa (Yunus. 2005:

240–249). Hal ini menjadi penting agar kota tidak menjadi kota parasit. Kota parasit adalah kota yang tidak banyak berfungsi untuk menolong daerah belakangnya dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di desa (Tarigan. 2006: 127). Paradigma pertama pembangunan kota yang telah disebutkan di atas senyatanya didapatkan dari pengalaman-pengalaman empirik di negara-negara maju, di mana kehidupan kota memang amat mudah melepaskan diri dari jeratan hubungan dengan desa-desa di sekitarnya. Untuk konteks Indonesia nampaknya amat tidak mudah mendudukkan pertumbuhan kota sembari melepaskan diri dan menutup mata dari kehidupan desa-desa di sekitarnya.

Pembangunan pedesaan sebenarnya bukanlah sekedar *platform* saat kampanye untuk meraup suara terbanyak saja seperti yang selama ini dilihat dalam isu-isu lain saat kampanye partai-partai politik di Indonesia. Pembangunan pedesaan haruslah lahir dari sebuah komitmen untuk berpihak dan membela masyarakat pedesaan sebagai komunitas mayoritas. Keberpihakan ini lahir dari sebuah ide untuk memberikan hak publik yaitu untuk disejahterakan. Sehingga, menstimulan lahirnya komitmen partai politik untuk pro kepada pembangunan pedesaan mencakup pendidikan politik, dan komunikasi politik yang baik antara partai politik dengan masyarakat pedesaan.

Selama ini dalam praktek politik, masyarakat pedesaan amat sulit mengakses parlemen karena masyarakat pedesaan tidak mengenal wakil-wakil mereka di parlemen. Hal ini dikarenakan partai politik sendiri masih amat sentralistis dan hegemoni. Calon-calon anggota parlemen boleh jadi adalah orang asing yang tidak dikenal dan tidak sensitif-responsif atas aspirasi masyarakat desa yang diwakilinya. Partai sendiri amat miskin untuk dapat melahirkan warga desa sebagai anggota parlemen, karena ongkos politik untuk menjadi anggota parlemen yang harus dibayar amatlah mahal dan itu tidak mungkin dari warga desa. Sehingga, jika demikian halnya maka partai harus mau menciptakan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat desa. Anggota dari partai politik yang duduk di parlemen harus mau turun ke desa, melepaskan baju kebesarannya sebagai anggota DPR(D) dan duduk sederajat, senasib sepenanggungan, duduk sama rata berdiri sama tinggi dihadapan para pemilihnya. Komunikasi politik ini bukan sekedar formalitas rutin menyerap aspirasi dari warga desa, tapi jauh dari itu, ini merupakan wujud akuntabilitas seorang anggota parlemen kepada konstituennya.

Selain itu, masyarakat desa pun harus mulai dididik menjadi aktor yang cerdas dalam berpolitik. Masyarakat desa harus mulai diajarkan bahwa mereka adalah warga negara yang berhak untuk disejahterakan, berhak memilih dan berpendapat serta memiliki hak untuk ikut serta dalam aktifitas politik merancang kebijakan. Warga desa harus disadarkan bahwa mereka punya hak untuk menuntut secara elegan kepada wakil-wakilnya atas pembangunan yang ada di desa. Warga desa sendiri harus mulai mandiri dalam mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya, sehingga, hubungan antara warga desa, parlemen dan pemerintah merupakan gerakan yang sinergi, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Partai politik juga diharapkan mampu menjadi *agent of change* di desa. Artinya, partai politik harus mampu memberikan pencerahan bagi pembangunan pedesaan melalui aktivitas non-politiknya. Partai politik harus mampu memberdayakan masyarakat desa sebagai konstituennya melalui kegiatan-kegiatan sosial budaya dan ekonomi. Kegiatan sosial budaya partai politik diarahkan kepada penguatan kemampuan untuk berkembang (*achievement abilities*), pengembangan percaya diri (*self confidence development*), pengembangan motivasi tinggi (*building motivation*) dan menjadi masyarakat pembelajar (*rational society*). Kegiatan ekonomi diarahkan kepada penguatan ekonomi melalui aktivitas ekonomi riil yang memungkinkan berjalan secara kontinyu di desa. Untuk dapat melakukan itu semua, partai politik harus memiliki kader yang cerdas, handal, kreatif dan berkomitmen untuk membangun desa. Kader-kader seperti ini akan lahir dari warga desa yang dikader secara baik oleh partai politik. Oleh karena itu, kaderisasi dalam partai politik sendiri harus menjadi perhatian penting. Kaderisasi yang baik dalam partai politik akan melahirkan kader pembangunan pedesaan yang baik juga.

Penutup

Penelitian Fan dkk., (1998) membuktikan bahwa kebijakan pemerintah India untuk membelanjakan anggaran pemerintah untuk pembangunan jalan-jalan antar desa dan penelitian agrikultur telah memberikan dua keuntungan besar. Keuntungan yang pertama adalah dengan program ini lebih banyak dan luas orang desa-miskin yang dapat merasakan subsidi. Keuntungan kedua, lebih dari sekedar keuntungan pertama, kebijakan ini ternyata secara tidak langsung

telah menstimulan produktifitas produksi agrikultur yang lebih besar. Hasil ini merupakan analisis evaluasi dari sebuah kebijakan pembangunan antar desa di India. Kebijakan ini telah lahir dan meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah untuk orang desa bukanlah hal yang mustahil. Tinggal pemerintah mau atau tidak membela kepentingan warga desa, dan mendesain kebijakan desa yang lebih maju, terpadu dan berkelanjutan.

Kelahiran partai politik untuk menyuarakan pembangunan desa mendesak untuk dilahirkan. Partai politik sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam hal menyuarakan aspirasi rakyat harus mau berpikir lebih keras untuk memikirkan kepentingan warga desa yang mayoritas. Partai politik harus mulai melakukan pemberdayaan untuk masyarakat desa untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan berdaya.

Publik harus mulai dicerdaskan dalam aktivitas politik yaitu dengan cara memilih partai-partai yang berkomitmen pada pembangunan pedesaan, dan mendesain pembangunan yang saling menguntungkan antara desa dan kota. Publik juga harus mulai melakukan *pressure* kepada partai politik dan anggota DPR(D) untuk senantiasa melakukan komunikasi secara lebih baik dengan warga desa untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap masalah-masalah pedesaan.

Daftar Pustaka

- Anderson, J.E. (1979) *Public Policy-Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Chatterjee, S. (2005) Poverty Reduction Strategies- Lessons from the Asian and Pacific Region on Inclusive Development. *Asian Development Review* 22 (1): 12.
- Fan, S., Hazell, P., and Thorat, T. (1998) *Government Spending, Growth And Poverty: An Analysis of Interlinkages In Rural India*. Washington, DC - U.S.A: Environment and Production Technology Division - International Food Policy Research Institute.
- Kanbur, R. (2005) Growth, Inequality And Poverty: Some Hard Questions. *Journal of International Affairs* 58(2): 223.
- Smeeding, T.M. (2005) *Public Policy, Economic Inequality, and Poverty: The United States in Comparative Perspective*. Social Science Quarterly. Academic Research Library. 955.
- Tarigan, R. (2006) *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yunus, H.S. (2005) *Manajemen Kota: Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.